

**GAGASAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN BERDASARKAN POTENSI
DAMPAK PERPAJAKAN DENGAN DIIMPLEMENTASIKANNYA PSAK 72:
PENDAPATAN DARI KONTRAK DENGAN PELANGGAN (STUDI KASUS
PADA INDUSTRI TELEKOMUNIKASI)**

INTISARI

Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dampak implementasi PSAK 72 terhadap penerimaan pendapatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari PPh badan yang dibayarkan oleh korporasi di industri telekomunikasi. Selain itu, juga untuk mengidentifikasi strategi yang dilakukan DJP dalam aspek kebijakan untuk mengakomodasi penerapan PSAK 72 dengan tetap melindungi kepentingan industri telekomunikasi dan penerimaan pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui strategi studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan analisis dokumen. Validitas dilakukan dengan triangulasi sumber dan metode serta *member checking*.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan PSAK 72 pada industri telekomunikasi memiliki dampak perpajakan berupa beda temporer dalam pengakuan pendapatan dan biaya kontrak, nilai waktu uang dari biaya pajak yang dibayarkan, potensi penerimaan pajak lebih besar pada awal tahun saat entitas menerapkan PSAK 72, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hal itu berarti bahwa dengan penerapan PSAK 72, penerimaan pajak lebih besar pada tahun awal penerapan PSAK 72, menimbulkan sanksi administrasi denda dan/atau bunga atas penghasilan yang diakui pada awal penerapan PSAK 72. Selain itu, penelitian juga menghasilkan lingkup gagasan dalam membuat kebijakan perpajakan, yaitu kenyamanan pembayaran pajak dan *interlocking system*.

Kata kunci: PSAK 72 Pendapatan dari Kontrak Dengan Pelanggan, Pajak Penghasilan Badan, Pengakuan Pendapatan, Pendapatan Produk Gabungan, IFRS 15 Revenues From Contracts With Customers

**THE CONCEPT OF TAX POLICY BASED ON POTENTIAL TAXATION
IMPACT ON IMPLEMENTATION OF PSAK 72: REVENUE FROM
CONTRACTS WITH CUSTOMERS (CASE STUDY ON
TELECOMMUNICATION INDUSTRY**

ABSTRACT

This study aims to identify the potential impact of the implementation of PSAK 72 on Directorate General of Taxes (DGT's) revenue from corporate income tax from corporations in the telecommunication industry. Additionally, this study also identifies DGT's strategies in terms of policies to accommodate the implementation of PSAK 72 but also protecting the interests of the telecommunications industry and tax revenues. This study is qualitative approach through a case study strategy. Qualitative study using interviews and document analysis. Validity test using member checking, triangulation of sources and methods.

The results of the study conclude that the applying PSAK 72 in the telecommunications industry has a tax impact in the form of temporary differences in the recognition of revenue and contract costs, the time value of money from tax costs paid, the potential for tax revenue greater in the initial year of the entity applying PSAK 72, and improving the quality of financial statements. The meaning of those results is tax revenue is greater in the initial year of applying PSAK 72 and generate administrative sanctions in the form of fines and/or interest from revenue that recognized at the beginning of applying PSAK 72. Additionally, this research bring in the scope of ideas to makes tax policies that is convenience of tax payment and interlocking system.

Keyword: PSAK 72 Pendapatan dari Kontrak Dengan Pelanggan, Corporate Income Tax, Revenue Recognition, Bundling Revenue, IFRS 15 Revenues From Contracts With Customers